



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	928.041.399.889,00
b. Belanja	Rp.	<u>979.407.058.413,50</u>
Surplus/defisit	Rp.	(51.365.658.524,50)
c. Pembiayaan :		
– Penerimaan	Rp.	123.386.866.374,00
– Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	123.386.866.374,00
Surplus/defisit	Rp.	72.021.207.849,50

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah		
Rp. 158.347.027.513,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.086.388.427.402,00
b. Realisasi	Rp.	928.041.399.889,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	158.347.027.513,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	Rp. 225.368.235.362,50	
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.204.775.293.776,00
b. Realisasi	Rp.	979.407.058.413,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	225.368.235.362,50
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah		
Rp. 67.021.207.849,50 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	118.386.866.374,00
b. Realisasi Surplus	Rp.	51.365.658.524,50
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	67.021.207.849,50

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 123.386.866.374,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 123.386.866.374,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 5.000.000.000,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 118.386.866.374,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 123.386.866.374,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 5.000.000.000,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	1.554.944.375.340,43
b. Jumlah kewajiban :		
- Jangka Pendek	Rp.	30.646.245.823,00
- Jangka Panjang	Rp.	0,00
Jumlah ekuitas dana	Rp.	1.524.298.129.517,43

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2016	Rp.	123.438.671.802,00
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	169.831.721.300,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(221.197.379.824,50)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	51.521.928,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2016	Rp.	72.286.459.826,50

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Bersih dan Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan XX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

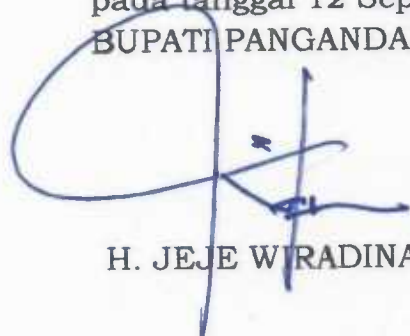
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.086.388.427.402,00	928.041.399.889,00	(158.347.027.513,00)	85,42
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.926.441.990,00	66.385.348.153,00	(9.541.093.837,00)	87,43
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.851.650.185,00	29.249.250.499,00	(3.602.399.686,00)	89,03
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.964.444.205,00	10.034.701.782,00	(6.929.742.423,00)	59,15
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.110.347.600,00	27.101.395.872,00	991.048.272,00	103,80
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	906.515.805.887,00	796.782.666.811,00	(109.733.139.076,00)	87,90
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	806.851.660.000,00	698.289.665.495,00	(108.561.994.505,00)	86,54
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	36.829.038.000,00	34.765.506.278,00	(2.063.531.722,00)	94,40
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	18.351.418.000,00	19.883.336.217,00	1.531.918.217,00	108,35
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	546.731.125.000,00	546.731.125.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	204.940.079.000,00	96.909.698.000,00	(108.030.381.000,00)	47,29
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.677.411.000,00	61.677.411.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	61.677.411.000,00	61.677.411.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	37.986.734.887,00	36.815.590.316,00	(1.171.144.571,00)	96,92
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.986.734.887,00	36.815.590.316,00	(1.171.144.571,00)	96,92
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	103.946.179.525,00	64.873.384.925,00	(39.072.794.600,00)	62,41
1.3.3	Pendapatan Lainnya	103.946.179.525,00	64.873.384.925,00	(39.072.794.600,00)	62,41
2	BELANJA	1.204.775.293.776,00	979.407.058.413,50	(225.368.235.362,50)	81,29
2.1	BELANJA OPERASI	891.417.603.751,76	751.273.419.136,00	(140.144.184.615,76)	84,28
2.1.1	Belanja Pegawai	526.792.265.198,00	422.754.304.429,00	(104.037.960.769,00)	80,25
2.1.2	Belanja Barang	206.515.546.037,76	172.339.007.006,00	(34.176.539.031,76)	83,45
2.1.4	Belanja Subsidi	9.446.304.000,00	8.096.832.000,00	(1.349.472.000,00)	85,71
2.1.5	Belanja Hibah	12.360.400.000,00	12.088.445.000,00	(271.955.000,00)	97,80
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	(100.000.000,00)	92,86
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	134.903.088.516,00	134.694.830.701,00	(208.257.815,00)	99,85
2.2	BELANJA MODAL	305.227.535.999,24	221.197.379.824,50	(84.030.156.174,74)	72,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.1	Belanja Tanah	6.252.331.800,00	4.938.165.639,00	(1.314.166.161,00)	78,98
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.565.966.156,24	29.490.166.038,50	(4.075.800.117,74)	87,86
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	59.448.744.393,00	20.428.960.651,00	(39.019.783.742,00)	34,36
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.754.699.550,00	163.381.468.796,00	(39.373.230.754,00)	80,58
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.205.794.100,00	2.958.618.700,00	(247.175.400,00)	92,29
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	7.130.154.025,00	6.936.259.453,00	(193.894.572,00)	97,28
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	7.130.154.025,00	6.936.259.453,00	(193.894.572,00)	97,28
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.659.589.570,00	5.656.797.428,00	(2.792.142,00)	99,95
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.470.564.455,00	1.279.462.025,00	(191.102.430,00)	87,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.386.866.374,00)	(51.365.658.524,50)	67.021.207.849,50	43,39
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.386.866.374,00	123.386.866.374,00	5.000.000.000,00	104,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	72.021.207.849,50	72.021.207.849,50	0,00

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.1	Belanja Tanah	6.252.331.800,00	4.938.165.639,00	(1.314.166.161,00)	78,98
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.565.966.156,24	29.490.166.038,50	(4.075.800.117,74)	87,86
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	59.448.744.393,00	20.428.960.651,00	(39.019.783.742,00)	34,36
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.754.699.550,00	163.381.468.796,00	(39.373.230.754,00)	80,58
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.205.794.100,00	2.958.618.700,00	(247.175.400,00)	92,29
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	7.130.154.025,00	6.936.259.453,00	(193.894.572,00)	97,28
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	7.130.154.025,00	6.936.259.453,00	(193.894.572,00)	97,28
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.659.589.570,00	5.656.797.428,00	(2.792.142,00)	99,95
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.470.564.455,00	1.279.462.025,00	(191.102.430,00)	87,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(118.386.866.374,00)	(51.365.658.524,50)	67.021.207.849,50	43,39
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.386.866.374,00	123.386.866.374,00	5.000.000.000,00	104,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	72.021.207.849,50	72.021.207.849,50	0,00

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

6.1.20.1.20.13.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	1.018.151.350,00	1.018.151.350,00			
6.1.20.1.20.13.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	1.018.151.350,00	1.018.151.350,00			
6.1.20.1.20.14	KECAMATAN CIJULANG		1.238.621.676,00	1.238.621.676,00			
6.1.20.1.20.14.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	1.238.621.676,00	1.238.621.676,00			
6.1.20.1.20.14.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	1.238.621.676,00	1.238.621.676,00			
6.1.20.1.20.15	KECAMATAN CIMERAK		1.420.188.463,00	1.420.188.463,00			
6.1.20.1.20.15.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	1.420.188.463,00	1.420.188.463,00			
6.1.20.1.20.15.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	1.420.188.463,00	1.420.188.463,00			
6.1.20.1.20.16	KECAMATAN CIGUGUR		1.466.526.609,00	1.466.526.609,00			
6.1.20.1.20.16.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	1.466.526.609,00	1.466.526.609,00			
6.1.20.1.20.16.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	1.466.526.609,00	1.466.526.609,00			
6.1.20.1.20.17	KECAMATAN LANGKAPLANCAR		1.524.369.892,00	1.524.369.892,00			
6.1.20.1.20.17.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	1.524.369.892,00	1.524.369.892,00			
6.1.20.1.20.17.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	1.524.369.892,00	1.524.369.892,00			
6.2	Urusan Pilihan		33.256.733.476,00	33.256.733.476,00			
6.2.04	Pariwisata		7.505.102.179,00	7.505.102.179,00			
6.2.04.2.04.01	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		7.505.102.179,00	7.505.102.179,00			
6.2.04.2.04.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	7.505.102.179,00	7.505.102.179,00			
6.2.04.2.04.01.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	7.505.102.179,00	7.505.102.179,00			
6.2.05	Kelautan dan Perikanan		25.751.631.297,00	25.751.631.297,00			
6.2.05.2.05.01	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN		25.751.631.297,00	25.751.631.297,00			
6.2.05.2.05.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	25.751.631.297,00	25.751.631.297,00			
6.2.05.2.05.01.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	25.751.631.297,00	25.751.631.297,00			

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 12 September 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT (2 / 174 / 2017)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.1.01.01.00.22.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.19	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan di Sekolah (Website Dinas)	30.745.000,00	23.957.000,00	(6.788.000,00)	77,92	
1.01.1.01.01.00.22.19.5.2.1	Belanja Pegawai	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.00.22.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	21.512.000,00	(6.788.000,00)	76,01	
1.01.1.01.01.00.22.20	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (PPDB Online)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.20.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.22	Bimtek Pengelolaan Aset Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.22.26	Pelaksanaan Manajemen Pangandaran Hebat	101.025.000,00	98.725.000,00	(2.300.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.00.22.26.5.2.1	Belanja Pegawai	74.550.000,00	72.850.000,00	(1.700.000,00)	97,72	
1.01.1.01.01.00.22.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.475.000,00	25.875.000,00	(600.000,00)	97,73	
1.01.1.01.01.00.25	Program Pangandaran Madani	9.111.284.850,00	8.940.258.240,00	(171.026.610,00)	98,12	
1.01.1.01.01.00.25.01	Ajengan Masuk Sekolah (AMS) SD/SMP/SMA/SMK	277.650.000,00	141.350.000,00	(136.300.000,00)	50,91	
1.01.1.01.01.00.25.01.5.2.1	Belanja Pegawai	71.550.000,00	54.750.000,00	(16.800.000,00)	76,52	
1.01.1.01.01.00.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.100.000,00	86.600.000,00	(119.500.000,00)	42,02	
1.01.1.01.01.00.25.02	Pangandaran Mengaji	8.833.634.850,00	8.798.908.240,00	(34.726.610,00)	99,61	
1.01.1.01.01.00.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	18.330.000,00	16.370.000,00	(1.960.000,00)	89,31	
1.01.1.01.01.00.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.815.304.850,00	8.782.538.240,00	(32.766.610,00)	99,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(427.348.885.621,00)	(343.040.519.545,00)	84.308.366.076,00	80,27	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN



H. JIJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	53,33	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	16.941.200,00	(11.258.800,00)	60,08	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.300.000,00	167.103.000,00	(197.000,00)	99,88	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 42	<i>Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Anak Citonjong Desa Bojong</i>	200.000.000,00	195.272.000,00	(4.728.000,00)	97,64	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	53,33	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	25.843.000,00	(2.357.000,00)	91,64	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.300.000,00	167.029.000,00	(271.000,00)	99,84	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31	Program Pengembangan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02	<i>Penyusunan Sistem Informasi / Database Air Tanah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(262.555.179.385,00)	(206.646.108.722,00)	55.909.070.663,00	78,71	


Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.100.000,00	47.287.500,00	(33.812.500,00)	58,31	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 39	<i>Penetapan Raperbup Juknis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	80.000.000,00	18.701.500,00	(61.298.500,00)	23,38	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.350.000,00	1.200.000,00	(36.150.000,00)	3,21	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.650.000,00	17.501.500,00	(25.148.500,00)	41,04	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 45	<i>Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	289.956.000,00	267.880.200,00	(22.075.800,00)	92,39	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.460.000,00	71.460.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.496.000,00	196.420.200,00	(22.075.800,00)	89,90	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 46	<i>Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</i>	50.000.000,00	49.868.903,00	(131.097,00)	99,74	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.368.903,00	(131.097,00)	99,56	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 47	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Unpad Multi Kampus</i>	30.000.000,00	29.510.500,00	(489.500,00)	98,37	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	18.960.500,00	(489.500,00)	97,48	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	85.390.000,00	85.390.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10	<i>Perencanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Alokasi Cukai Tembakau</i>	85.390.000,00	85.390.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.879.428.922,00)	(7.878.008.906,00)	1.001.420.016,00	88,72	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01	<i>Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga (DAK)</i>	117.000.000,00	110.642.000,00	(6.358.000,00)	94,57	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	1.952.000,00	(1.558.000,00)	55,61	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.600.000,00	106.800.000,00	(4.800.000,00)	95,70	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02	<i>Pengadaan Tempat Sampah (DAK)</i>	213.140.000,00	191.015.000,00	(22.125.000,00)	89,62	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.015.000,00	(485.000,00)	80,60	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	208.750.000,00	187.110.000,00	(21.640.000,00)	89,63	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	142.190.000,00	132.068.500,00	(10.121.500,00)	92,88	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01	<i>Pembuatan Lubang Resapan Biopori (DAK)</i>	142.190.000,00	132.068.500,00	(10.121.500,00)	92,88	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.890.000,00	1.990.000,00	(2.900.000,00)	40,70	
1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.300.000,00	130.078.500,00	(7.221.500,00)	94,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.083.465.473,00)	(4.726.581.852,00)	356.883.621,00	92,98	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.13 . 1.10.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.10.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.10.01 . 01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	64.880.000,00	63.150.000,00	(1.730.000,00)	97,33	
1.13 . 1.10.01 . 01 . 21 . 05	<i>Bimbingan motifasi sosial bagi generasi muda dlm penanggulangan penyalahgunaan NAFZA</i>	64.880.000,00	63.150.000,00	(1.730.000,00)	97,33	
1.13 . 1.10.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
1.13 . 1.10.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.380.000,00	48.650.000,00	(1.730.000,00)	96,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.749.637.274,00)	(10.964.899.123,00)	784.738.151,00	93,32	

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.659.900,00	8.659.900,00	0,00	100,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 07	Pembinaan RT / RW	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 09	Monitoring dan Evaluasi APB Desa	46.075.000,00	33.958.000,00	(12.117.000,00)	73,70	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.475.000,00	24.358.000,00	(12.117.000,00)	66,78	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 10	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	40.000.000,00	34.090.000,00	(5.910.000,00)	85,23	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
1.22 . 1.11.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	21.440.000,00	(5.910.000,00)	78,39	
1.12 . 1.11.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	19.141.000,00	17.579.000,00	(1.562.000,00)	91,84	
1.12 . 1.11.01 . 01 . 21 . 01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Di Sekolah	19.141.000,00	17.579.000,00	(1.562.000,00)	91,84	
1.12 . 1.11.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.12 . 1.11.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.741.000,00	13.179.000,00	(1.562.000,00)	89,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.657.529.597,00)	(7.874.294.456,00)	4.783.235.141,00	62,21	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	33.396.000,00	(74.000,00)	99,78	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	34.137.500,00	34.101.500,00	(36.000,00)	99,89	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.387.500,00	20.351.500,00	(36.000,00)	99,82	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 06	Pembentukan dan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	41.800.000,00	41.799.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.249.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	158.215.250,00	143.171.100,00	(15.044.150,00)	90,49	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07	Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pilpres Serta Persiapan Pemilihan Kepala Daerah	79.715.250,00	79.715.250,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	815.250,00	815.250,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	28.500.000,00	26.336.050,00	(2.163.950,00)	92,41	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	2.486.050,00	(2.163.950,00)	53,46	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 11	Pembinaan ORMAS, LSM dan OKP	50.000.000,00	37.119.800,00	(12.880.200,00)	74,24	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	21.219.800,00	(12.880.200,00)	62,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.165.973.957,00)	(1.885.311.109,00)	280.662.848,00	87,04	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIFADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.19 . 1.19.02 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.000.000,00	86.000.000,00	(43.000.000,00)	66,67	
1.19 . 1.19.02 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.223.000,00	41.303.000,00	(28.920.000,00)	58,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.712.374.158,00)	(6.055.617.011,00)	656.757.147,00	90,22	

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

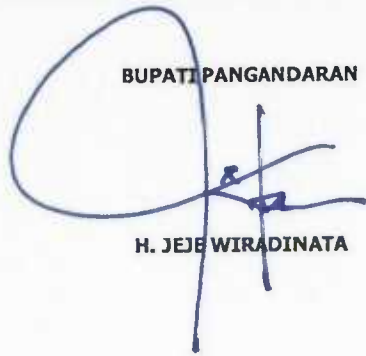
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA



Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan	: 1. 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi	: 1. 20 . 01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 1. 20 . 01 . 01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.787.866.189,00	7.649.393.840,00	(138.472.349,00)	98,22	PP 70 Tahun 2015
1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.787.866.189,00	7.649.393.840,00	(138.472.349,00)	98,22	
1.20 . 1.20.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.787.866.189,00	7.649.393.840,00	(138.472.349,00)	98,22	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.787.866.189,00)	(7.649.393.840,00)	138.472.349,00	98,22	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20.1.20.02.01.00.00.5	BELANJA	608.434.486,00	535.260.866,00	(73.173.620,00)	87,97	PP 70 Tahun 2015
1.20.1.20.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	608.434.486,00	535.260.866,00	(73.173.620,00)	87,97	
1.20.1.20.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	608.434.486,00	535.260.866,00	(73.173.620,00)	87,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(608.434.486,00)	(535.260.866,00)	73.173.620,00	87,97	

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 12 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


 MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017


 BUPATI PANGANDARAN
 H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 09	<i>Perumusan Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran</i>	56.830.000,00	55.828.187,00	(1.001.813,00)	98,24	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.730.000,00	35.728.187,00	(1.001.813,00)	97,27	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 10	<i>Penilaian Refromasi Birokrasi Mandiri</i>	86.430.000,00	72.886.857,00	(13.543.143,00)	84,33	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.03 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00	39.736.857,00	(13.543.143,00)	74,58	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.669.211.241,00)	(30.366.891.251,00)	6.302.319.990,00	82,81	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.500.000,00	102.565.000,00	(17.935.000,00)	85,12	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07	<i>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	1.355.100.000,00	1.311.481.800,00	(43.618.200,00)	96,78	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	1.600.000,00	(3.000.000,00)	34,78	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.500.000,00	1.309.881.800,00	(40.618.200,00)	96,99	
1.06 . 1.20.04 . 01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.04 . 01 . 22 . 12	<i>Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.04 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.04 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 34	Program Kerjasama Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media	339.745.000,00	333.566.000,00	(6.179.000,00)	98,18	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 34 . 01	<i>Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</i>	339.745.000,00	333.566.000,00	(6.179.000,00)	98,18	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.04 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.320.000,00	329.141.000,00	(6.179.000,00)	98,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.844.568.032,00)	(14.900.728.633,00)	1.943.839.399,00	88,46	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017


BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	14.913.000,00	(6.587.000,00)	69,36	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 109	Penyusunan Perbup Tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	32.850.000,00	24.726.000,00	(8.124.000,00)	75,27	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	9.750.000,00	(1.600.000,00)	85,90	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	14.976.000,00	(6.524.000,00)	69,66	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 110	Penyusunan Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah	32.650.000,00	24.984.000,00	(7.666.000,00)	76,52	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	10.150.000,00	(2.000.000,00)	83,54	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	14.834.000,00	(5.666.000,00)	72,36	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000,00	42.515.000,00	(7.485.000,00)	85,03	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 23 . 08	Pembuatan Website	50.000.000,00	42.515.000,00	(7.485.000,00)	85,03	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.040.000,00	42.515.000,00	(5.525.000,00)	88,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	855.097.171.658,00	711.316.083.205,00	(143.781.088.453,00)	83,19	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	123.386.866.374,00	123.386.866.374,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	118.386.866.374,00	123.386.866.374,00	5.000.000.000,00	104,22	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

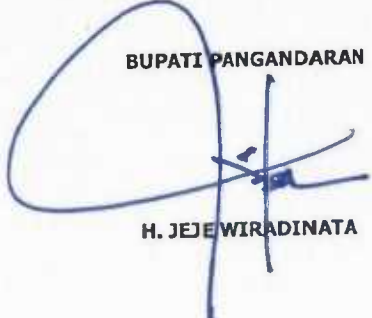

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7


 BUPATI PANGANDARAN
 H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 12 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.16 . 1.20.07 . 01 . 16 . 13	<i>Pengembangan system Website Promosi dan Investasi di Kabupaten Pangandaran</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.07 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.07 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	294.622.450,00	286.802.200,00	(7.820.250,00)	97,35	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 01	<i>Sosialisasi Pelayanan Perijinan</i>	60.642.450,00	59.905.450,00	(737.000,00)	98,78	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.892.450,00	53.155.450,00	(737.000,00)	98,63	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 09	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan</i>	128.680.000,00	124.712.500,00	(3.967.500,00)	96,92	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.780.000,00	81.780.000,00	(3.000.000,00)	96,46	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.900.000,00	42.932.500,00	(967.500,00)	97,80	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 10	<i>Penyusunan Perda Perizinan</i>	55.000.000,00	53.050.250,00	(1.949.750,00)	96,46	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.600.000,00	22.000.000,00	(1.600.000,00)	93,22	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	31.050.250,00	(349.750,00)	98,89	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 11	<i>Evaluasi dan verifikasi Perizinan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 12	<i>Kegiatan Pembuatan Papan Reklame Perizinan</i>	50.300.000,00	49.134.000,00	(1.166.000,00)	97,68	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	48.334.000,00	(1.166.000,00)	97,64	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 13	<i>Pengadaan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Online Service</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(991.410.046,00)	(1.279.463.690,00)	(288.053.644,00)	129,05	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

LAMPIRAN 1.2 PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	398.620.000,00	393.233.000,00	(5.387.000,00)	98,65	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 06	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	19.725.000,00	19.695.000,00	(30.000,00)	99,85	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	13.020.000,00	(30.000,00)	99,77	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 07	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	22.815.000,00	22.295.000,00	(520.000,00)	97,72	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.175.000,00	6.675.000,00	(500.000,00)	93,03	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	15.620.000,00	(20.000,00)	99,87	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 08	Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 11	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	336.780.000,00	331.943.000,00	(4.837.000,00)	98,56	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.860.000,00	(3.140.000,00)	84,30	
1.20 . 1.20.08 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	315.690.000,00	313.993.000,00	(1.697.000,00)	99,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.809.530.875,00)	(1.742.304.314,00)	67.226.561,00	96,28	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	147.580.000,00	131.614.602,00	(15.965.398,00)	89,18	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 06	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	21.940.000,00	20.940.000,00	(1.000.000,00)	95,44	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	9.640.000,00	(1.000.000,00)	90,60	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 07	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	39.600.000,00	26.736.446,00	(12.863.554,00)	67,52	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	8.475.000,00	(2.825.000,00)	75,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	18.261.446,00	(10.038.554,00)	64,53	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 08	Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	20.940.000,00	20.940.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 11	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	65.100.000,00	62.998.156,00	(2.101.844,00)	96,77	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	11.750.000,00	(550.000,00)	95,53	
1.20 . 1.20.09 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	51.248.156,00	(1.551.844,00)	97,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.537.604.169,00)	(1.424.874.394,00)	112.729.775,00	92,67	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.380.000,00	(1.620.000,00)	59,50	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	19.300.000,00	18.784.000,00	(516.000,00)	97,33	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	12.500.000,00	12.200.000,00	(300.000,00)	97,60	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	9.950.000,00	(300.000,00)	97,07	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	6.800.000,00	6.584.000,00	(216.000,00)	96,82	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.10 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.784.000,00	(216.000,00)	95,68	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	131.400.000,00	122.234.004,00	(9.165.996,00)	93,02	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	22.600.000,00	20.045.000,00	(2.555.000,00)	88,69	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.445.000,00	(2.555.000,00)	82,97	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	22.700.000,00	22.325.000,00	(375.000,00)	98,35	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.625.000,00	(375.000,00)	97,12	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	18.100.000,00	16.360.000,00	(1.740.000,00)	90,39	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	8.760.000,00	(1.740.000,00)	83,43	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 11	<i>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</i>	68.000.000,00	63.504.004,00	(4.495.996,00)	93,39	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	14.875.000,00	(3.125.000,00)	82,64	
1.20 . 1.20.10 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.629.004,00	(1.370.996,00)	97,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.462.834.897,00)	(1.399.045.356,00)	63.789.541,00	95,64	

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	11.725.000,00	11.525.000,00	(200.000,00)	98,29	
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.500.000,00	(200.000,00)	97,94	
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.11 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	535.580.000,00	451.897.650,00	(83.682.350,00)	84,38	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	145.000.000,00	85.862.000,00	(59.138.000,00)	59,22	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	17.700.000,00	(1.000.000,00)	94,65	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.300.000,00	68.162.000,00	(58.138.000,00)	53,97	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	33.800.000,00	28.733.950,00	(5.066.050,00)	85,01	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	20.033.950,00	(5.066.050,00)	79,82	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	20.000.000,00	16.943.700,00	(3.056.300,00)	84,72	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	8.243.700,00	(3.056.300,00)	72,95	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 11	<i>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</i>	336.780.000,00	320.358.000,00	(16.422.000,00)	95,12	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	31.396.000,00	(15.224.000,00)	67,34	
1.20 . 1.20.11 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	289.070.000,00	287.872.000,00	(1.198.000,00)	99,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.770.588.029,00)	(1.603.492.766,00)	167.095.263,00	90,36	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.13 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	60.000.000,00	56.780.000,00	(3.220.000,00)	94,63	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	20.000.000,00	19.020.000,00	(980.000,00)	95,10	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.200.000,00	(500.000,00)	94,25	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	10.820.000,00	(480.000,00)	95,75	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	20.000.000,00	18.850.000,00	(1.150.000,00)	94,25	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.200.000,00	(500.000,00)	94,25	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	10.650.000,00	(650.000,00)	94,25	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	20.000.000,00	18.910.000,00	(1.090.000,00)	94,55	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.450.000,00	(250.000,00)	97,13	
1.20 . 1.20.13 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	10.460.000,00	(840.000,00)	92,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.085.676.728,00)	(1.018.151.350,00)	67.525.378,00	93,78	

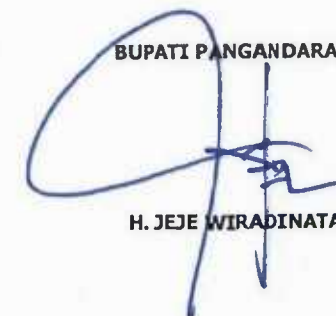
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.12 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	46.762.000,00	46.762.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	10.627.000,00	10.627.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.227.000,00	3.227.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.225.306.849,00)	(1.198.017.906,00)	27.288.943,00	97,77	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.14 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	134.819.300,00	117.986.300,00	(16.833.000,00)	87,51	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 06	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	17.745.800,00	17.240.800,00	(505.000,00)	97,15	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	7.800.000,00	(300.000,00)	96,30	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.645.800,00	9.440.800,00	(205.000,00)	97,87	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 07	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	21.389.000,00	20.931.500,00	(457.500,00)	97,86	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.989.000,00	12.531.500,00	(457.500,00)	96,48	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 08	Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	17.034.500,00	16.430.000,00	(604.500,00)	96,45	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.400.000,00	(300.000,00)	96,10	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.334.500,00	9.030.000,00	(304.500,00)	96,74	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 11	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	78.650.000,00	63.384.000,00	(15.266.000,00)	80,59	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	12.775.000,00	(3.425.000,00)	78,86	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.450.000,00	50.609.000,00	(11.841.000,00)	81,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.369.522.066,00)	(1.238.621.676,00)	130.900.390,00	90,44	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	4.780.000,00	(1.600.000,00)	74,92	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.445.000,00	15.445.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.15 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	54.060.000,00	49.203.000,00	(4.857.000,00)	91,02	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	16.780.000,00	15.988.000,00	(792.000,00)	95,28	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	7.788.000,00	(792.000,00)	90,77	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	20.500.000,00	18.410.000,00	(2.090.000,00)	89,80	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	10.300.000,00	(1.200.000,00)	89,57	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.110.000,00	(890.000,00)	90,11	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	16.780.000,00	14.805.000,00	(1.975.000,00)	88,23	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.200.000,00	(500.000,00)	94,25	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	6.605.000,00	(1.475.000,00)	81,75	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.490.635.633,00)	(1.420.188.463,00)	70.447.170,00	95,27	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.650.000,00	(100.000,00)	97,33	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	23.860.000,00	21.140.000,00	(2.720.000,00)	88,60	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 14	<i>Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 32	<i>Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	10.310.000,00	7.590.000,00	(2.720.000,00)	73,62	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.16 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	6.040.000,00	(2.720.000,00)	68,95	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	96.650.000,00	95.975.000,00	(675.000,00)	99,30	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 06	<i>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	32.100.000,00	32.075.000,00	(25.000,00)	99,92	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.575.000,00	(25.000,00)	99,74	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 07	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	38.750.000,00	38.400.000,00	(350.000,00)	99,10	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	9.600.000,00	(350.000,00)	96,48	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 08	<i>Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan</i>	25.800.000,00	25.500.000,00	(300.000,00)	98,84	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
1.20 . 1.20.16 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.514.342.197,00)	(1.466.526.609,00)	47.815.588,00	96,84	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	20.780.000,00	20.780.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.20.17 . 01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	186.760.000,00	175.260.000,00	(11.500.000,00)	93,84	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 06	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	36.160.000,00	35.710.000,00	(450.000,00)	98,76	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.385.000,00	29.935.000,00	(450.000,00)	98,52	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 07	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	44.560.000,00	43.920.000,00	(640.000,00)	98,56	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.035.000,00	37.395.000,00	(640.000,00)	98,32	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 08	Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	35.240.000,00	34.940.000,00	(300.000,00)	99,15	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	7.400.000,00	(300.000,00)	96,10	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	100,00	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 11	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	70.800.000,00	60.690.000,00	(10.110.000,00)	85,72	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	
1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	43.890.000,00	(8.910.000,00)	83,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.657.325.109,00)	(1.524.369.892,00)	132.955.217,00	91,98	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.000.000,00	0,00	(196.000.000,00)	0,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 13	Pembuatan Dokumen Feasibility Study Pasar Tradisional Pananjung	50.000.000,00	43.793.000,00	(6.207.000,00)	87,59	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.385.000,00	42.178.000,00	(6.207.000,00)	87,17	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 14	Pembuatan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL) Pasar Tradisional Pananjung	50.000.000,00	43.728.000,00	(6.272.000,00)	87,46	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.385.000,00	42.113.000,00	(6.272.000,00)	87,04	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 17	Pembuatan IPAL Relokasi Pedagang Sebelah Selatan Pasar Pananjung	100.000.000,00	95.585.000,00	(4.415.000,00)	95,59	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	1.500.000,00	(4.250.000,00)	26,09	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.770.000,00	92.605.000,00	(165.000,00)	99,82	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 21	Kajian Pertokoan Modern	50.000.000,00	40.849.000,00	(9.151.000,00)	81,70	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	40.049.000,00	(9.151.000,00)	81,40	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 22	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	183.030.000,00	173.584.000,00	(9.446.000,00)	94,84	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 22 . 01	Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)	183.030.000,00	173.584.000,00	(9.446.000,00)	94,84	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.950.000,00	50.950.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.04.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.080.000,00	122.634.000,00	(9.446.000,00)	92,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.671.135.680,00)	(7.505.102.179,00)	(1.833.966.499,00)	132,34	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01 . 2.05.01 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.025.000,00	88.351.000,00	(1.674.000,00)	98,14	
2.01 . 2.05.01 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.560.000.000,00	1.556.447.000,00	(3.553.000,00)	99,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.780.502.494,00)	(25.751.631.297,00)	4.028.871.197,00	86,47	

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	Rp	%
		3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10	11	12
2.07.2.04.01	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	13.675.000,00	233.672.000,00	-	247.347.000,00	13.675.000,00	230.505.998,00	-	244.180.998,00	(3.166.002,00)	98,72%
2.07.2.04.01.01	DINAS PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	13.675.000,00	233.672.000,00	-	247.347.000,00	13.675.000,00	230.505.998,00	-	244.180.998,00	(3.166.002,00)	98,72%
2.07.2.04.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	12.375.000,00	191.657.000,00	-	204.032.000,00	12.375.000,00	191.254.000,00	-	203.629.000,00	(403.000,00)	99,80%
2.07.2.04.01.01.16.01	Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.07.2.04.01.01.16.07	Pendataan Industri Kecil dan Menengah	7.575.000,00	19.119.000,00	-	26.694.000,00	7.575.000,00	19.119.000,00	-	26.694.000,00	-	100,00%
2.07.2.04.01.01.16.10	Gelar Potensi Daerah (Pameran)	4.800.000,00	172.538.000,00	-	177.338.000,00	4.800.000,00	172.135.000,00	-	176.935.000,00	(403.000,00)	99,77%
2.07.2.04.01.01.16.12	Pengadaan Pembangunan Sarana Industri (Galeri/Rumah Percontohan) (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.07.2.04.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.300.000,00	42.015.000,00	-	43.315.000,00	1.300.000,00	39.251.998,00	-	40.551.998,00	(2.763.002,00)	93,62%
2.07.2.04.01.01.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.07.2.04.01.01.17.05	Bantuan Alat Mesin Produksi dan Kemasan Jus	1.300.000,00	42.015.000,00	-	43.315.000,00	1.300.000,00	39.251.998,00	-	40.551.998,00	(2.763.002,00)	93,62%
2.08	Transmigrasi	7.650.000,00	219.820.000,00	-	227.470.000,00	7.650.000,00	219.796.168,00	-	227.446.168,00	(23.832,00)	99,99%
2.08.1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.650.000,00	219.820.000,00	-	227.470.000,00	7.650.000,00	219.796.168,00	-	227.446.168,00	(23.832,00)	99,99%
2.08.1.10.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.650.000,00	219.820.000,00	-	227.470.000,00	7.650.000,00	219.796.168,00	-	227.446.168,00	(23.832,00)	99,99%
2.08.1.10.01.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	4.800.000,00	201.890.000,00	-	206.690.000,00	4.800.000,00	201.871.168,00	-	206.671.168,00	(18.832,00)	99,99%
2.08.1.10.01.01.15.02	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.600.000,00	81.700.000,00	-	83.300.000,00	1.600.000,00	81.688.000,00	-	83.288.000,00	(12.000,00)	99,99%
2.08.1.10.01.01.15.05	Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	1.600.000,00	64.640.000,00	-	66.240.000,00	1.600.000,00	64.633.168,00	-	66.233.168,00	(6.832,00)	99,99%
2.08.1.10.01.01.15.06	Peninjauan Kesiapan Lokasi Unit - unit Permukiman Transmigrasi	1.600.000,00	55.550.000,00	-	57.150.000,00	1.600.000,00	55.550.000,00	-	57.150.000,00	-	100,00%
2.08.1.10.01.01.16	Program Transmigrasi Lokal	2.850.000,00	17.930.000,00	-	20.780.000,00	2.850.000,00	17.925.000,00	-	20.775.000,00	(5.000,00)	99,98%
2.08.1.10.01.01.16.01	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.08.1.10.01.01.16.04	Pendataan Ulang Transmigrasi Lokal	2.850.000,00	17.930.000,00	-	20.780.000,00	2.850.000,00	17.925.000,00	-	20.775.000,00	(5.000,00)	99,98%
2.08.1.10.01.01.17	Program Transmigrasi Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.08.1.10.01.01.17.01	Penyuluhan Transmigrasi Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.08.1.10.01.01.17.02	Pelatihan Transmigrasi Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Jumlah		26.495.215.650,00	206.515.546.037,76	305.227.535.999,24	538.238.297.687,00	22.497.203.915,00	172.356.807.006,00	221.197.379.824,50	416.051.390.743,50	(122.186.906.941,50)	77,30%

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	252.723.797.507,00	199.508.007.090,00	(53.215.790.417,00)	78,94
06	1	03	Pekerjaan Umum	242.386.217.851,00	190.962.007.604,00	(51.424.210.247,00)	78,78
06	1	04	Perumahan	10.337.579.656,00	8.545.999.486,00	(1.791.580.170,00)	82,67
07			KESEHATAN	130.879.286.906,00	79.540.069.496,50	(51.339.217.409,50)	60,77
07	1	02	Kesehatan	129.661.126.306,00	78.438.306.246,50	(51.222.820.059,50)	60,49
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.218.160.600,00	1.101.763.250,00	(116.397.350,00)	90,44
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	14.905.843.680,00	13.188.781.136,00	(1.717.062.544,00)	88,48
08	1	17	Kebudayaan	867.095.000,00	858.169.000,00	(8.926.000,00)	98,97
08	2	04	Pariwisata	14.038.748.680,00	12.330.612.136,00	(1.708.136.544,00)	87,83
10			PENDIDIKAN	433.649.667.921,00	348.579.742.686,00	(85.069.925.235,00)	80,38
10	1	01	Pendidikan	424.118.951.421,00	340.222.763.186,00	(83.896.188.235,00)	80,22
10	1	18	Pemuda dan Olah Raga	9.530.716.500,00	8.356.979.500,00	(1.173.737.000,00)	87,68
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	20.451.773.871,00	15.444.544.825,00	(5.007.229.046,00)	75,52
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil	9.251.416.074,00	8.768.594.982,00	(482.821.092,00)	94,78
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.485.802.597,00	5.211.984.370,00	(4.273.818.227,00)	54,95
11	1	13	Sosial	1.714.555.200,00	1.463.965.473,00	(250.589.727,00)	85,38
JUMLAH				1.204.775.293.776,00	979.407.058.413,50	(225.368.235.362,50)	81,29

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN


MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

BUPATI PANGANDARAN


H. JEJE WIRADINATA



KABUPATEN PANGANDARAN
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Golongan				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	SD/MI	8	10	-	-	18
2	SMP/MTs	9	45	-	-	54
3	SMA/SMK/MA	-	215	197	12	424
4	D-I	-	6	16	5	27
5	D-II	-	14	10	80	104
6	D-III	-	125	124	17	266
7	D-IV	-	-	8	3	11
8	S-1	-	-	953	1.543	2.496
9	S-2	-	-	81	227	308
10	S-3	-	-	1	3	4
	Jumlah	17	415	1.390	1.890	3.712

No	Nama	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Jabatan masih kosong
1	Eselon II.a	1	1	0
2	Eselon II.b	18	18	0
3	Eselon III.a	37	30	7
4	Eselon III.b	57	54	3
5	Eselon IV.a	270	268	2
6	Eselon IV.b	78	66	12
7	Eselon V.a	35	23	12
	Jumlah	496	460	36

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 12 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I.6 : PERATURAN DAERAH
Nomor : 2 TAHUN 2017
Tanggal : 12 September 2017

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
Jumlah											

NIHIL

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Lampiran II : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
Saldo Anggaran Lebih Awal	123.386.866.374,00	130.669.272.068,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	123.386.866.374,00	130.669.272.068,00
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	72.021.207.849,50	123.386.866.374,00
Subtotal	72.021.207.849,50	123.386.866.374,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	72.021.207.849,50	123.386.866.374,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Uraian	2016	2015
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	110.148.561.517,22	234.584.219.662,30
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	110.148.561.517,22	234.584.219.662,30

Bupati Pangandaran



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

Uraian	2016	2015
EKUITAS AWAL	1.419.062.303.942,17	1.353.777.122.320,66
SURPLUS/DEFISIT-LO	110.148.561.517,22	234.584.219.662,30
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Piutang Pajak	94.637.112,00	0,00
Koreksi Persediaan	36.820.500,00	0,00
Koreksi Aset Tetap Tanah	(1.551.002.005,00)	41.787.591.610,00
Koreksi Aset Tetap Peralatan & Mesin	(3.947.418.719,25)	0,00
Koreksi Aset Tetap Gedung & Bangunan	30.226.817.432,00	0,00
Koreksi Aset Tetap Jalan, Jaringan & Irigasi	24.108.699.864,10	0,00
Koreksi Aset Tetap Lainnya	4.707.806.704,50	0,00
Koreksi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	(20.753.203.380,00)	0,00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap	(85.849.275,94)	(173.290.247.704,00)
Koreksi Aset Lainnya	(18.172.421.983,15)	0,00
Koreksi TGR	(7.950.000,00)	0,00
Koreksi Aset Lain-lain	57.792.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(19.627.464.191,21)	(37.796.381.946,79)
EKUITAS AKHIR	1.524.298.129.517,43	1.419.062.303.942,17

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Uraian	2016	2015
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	103.327.356,00	51.805.428,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.799.600,00	2.225.000,00
Utang Belanja	32.477.517,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.504.641.350,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	30.646.245.823,00	54.030.428,00
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	30.646.245.823,00	54.030.428,00
EKUITAS		
Ekuitas	1.524.298.129.517,43	1.419.062.303.942,17
JUMLAH EKUITAS	1.524.298.129.517,43	1.419.062.303.942,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.554.944.375.340,43	1.419.116.334.370,17

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Uraian	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.765.344.117,34	46.802.185.328,76
Jumlah Arus Masuk Kas	45.765.344.117,34	46.802.185.328,76
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.713.822.189,34	49.855.428.415,76
Jumlah Arus Keluar Kas	45.713.822.189,34	49.855.428.415,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	51.521.928,00	(3.053.243.087,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	(51.314.136.596,50)	(10.335.648.781,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	123.438.671.802,00	133.779.519.083,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	72.124.535.205,50	123.443.870.302,00
Saldo Kas Lainnya	161.924.621,00	6.805.432.396,00
Saldo Akhir Kas	72.286.459.826,50	130.249.302.698,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

No	Nama Penerima	Alamat	Nilai (Rp)
86	MAS Miftahul Huda	Jl. Stasiun Bojongjati RT. 03 RW. 04 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran	24.000.000,00
87	MAS Ypp Babakan Jamanis	Jl. Cigugur Km 03 Pasirkiara Parigi	101.500.000,00
88	MAS Ypk Cijulang	Jln. Ponpes Kalangsari No.16 Desa Kondangjajar. Kec. Cijulang	126.000.000,00
89	MAS Al Furqon Cimerak	Jl. Cilele No.05B Cidadap Tlp. 082240652864	89.000.000,00
90	MAS Ybh Cimindi	Jl. Bunisari No. 148 Dsn. Ciwangkal, Ds. Cimindi Kecamatan Cigugur	94.500.000,00
91	MAS Asy Sylfa	Dusun Sukarenah Rt. 01 Rw. 07 Telp. 0265-653761	36.000.000,00
92	MA Kertajaya	Jl. Bendung manganti no 403. RT/RW 08/06 Desa kertajaya,	16.750.000,00
93	MA Miftahul Ulum	Jl. Desa Mekarwangi Dsn. Girikarya DS.Kec. Langkaplancar	26.250.000,00
	Subtotal		1.808.325.000,00
SEKOLAH DIBAWAH KEMENTERIAN AGAMA (NEGERI)			
1	MTsN 1 Pangandaran (Pangandaran)	Jl. Merdeka No.113, Pananjung, Ciamis, Pangandaran, Jawa Barat 46396	175.875.000,00
2	MTsN 2 Pangandaran (CIMERAK)	Jl. Raya Cimerak, Cimerak, Pangandaran, Jawa Barat 46395	68.600.000,00
3	MTsN 3 Pangandaran (Sindangjaya)	Jl. Cikadu No.128 RT.10/01 Bangunjaya Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran	45.500.000,00
4	MTsN 4 Pangandaran (Langkaplancar)	Dsn. Hegarmanah Ds. Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran	39.900.000,00
5	MAN 1 Pangandaran (Pangandaran)	Jl. Raya Cijulang No. 234 Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran	191.400.000,00
6	MAN 2 Pangandaran (Pangkalan/langkaplancar)	Jl. Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran	189.600.000,00
7	MIN 1 Pangandaran (Cikarees)	Dsn. Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran 46371	33.200.000,00
8	MIN 2 Pangandaran (Sindangjaya)	Jl. Perjuangan No. 1 Dsn. Jelat Ds. Harumandala Kec. Cigugur Kab. Pangandaran 46392	23.200.000,00
9	MIN 3 Pangandaran (Tunggilis)	Jl. Pangandaran No 62 Ds. Tunggilis Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran 46397	23.800.000,00
10	MIN 4 Pangandaran (langkaplancar)	Dsn Citarenggang Rt 06 Rw 06 Ds. Pangkalan Kec. Langkaplancar 46391	17.000.000,00
11	MIN 5 Pangandaran (Masawah)	Dsn Babakan Rt 16 Rw 05 Ds Masawah Kec. Cimerak Kab. Pangandaran 46395	12.300.000,00
12	MIN 6 Pangandaran (Purbahayu)	JL. Sukajadi No. 27 Ds. Purbahayu Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran 46396	14.100.000,00
	Subtotal		834.475.000,00
LEMBAGA KEAGAMAAN (DKM/MASJID)			
1	DKM AL-AMANAHA	Rw 02 Dusun Pangandaran Timur Desa Pangandaran Kec. Pangandaran	100.000.000,00
2	DKM AL-BAHAR	Jln Kidang Pananjung Rt 01 Rw 04 Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kec. Pangandaran	200.000.000,00
3	MESJID MIFTAHUL JANNAH	Panyiriban Rw 07 Ciawitali Desa Pamotan Kec. Kalipucang	150.000.000,00
4	MESJID DKL AL IHSAN	Dusun Sucen Desa Cibenda Kec. Parigi	50.000.000,00
5	DKM ADDINIYAH	Dusun Pangandaran Timur Rt 002 Rw 002 Desa Pangandaran Kec. Pangandaran	50.000.000,00
6	DKM AL-IKHWAN	Rt 003 Rw 004 Desa Pangandaran Kec. Pangandaran	50.000.000,00
7	DKM AL MUKOROBIN	Dusun Sindangjaya Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya	25.000.000,00
8	DKM HIDAYATUL BASYARI	Dusun Hegarmanah Rt 13 Rw 04 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya	25.000.000,00
9	DKM AT-TAQWA	Dusun Bunisinga Rt 01 Rw 02 Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya	25.000.000,00
10	MESJID BAETUL ARIF	Dusun Babakan Rt 007 Rw 002 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya	50.000.000,00
11	MESJID AL- JAMA'AH	Dusun Burujul Rt 008 Rw 006 Desa Padaherang Kec. Padaherang	20.000.000,00
12	MESJID BAETUL ROHMAN	Dusun Bojong Salak Rt 001 Rw 005 Desa Bojongsari Kec. Padaherang	15.000.000,00
13	MESJID MIFTAHUL JANNAH	Dusun Sapuangin Rt 026 Rw 013 Desa Karangsari Kec. Padaherang	15.000.000,00
14	MESJID NURUL IMAN	Dusun Giri Setra Rt 001 Rw 002 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang	50.000.000,00
15	MESJID AL FATONAH	Dusun Karangsalam Rt 02 Rw 05 Desa Pananjung Kec. Pangandaran	15.000.000,00
16	MESJID AL- HIDAYAH	Dusun Karangsalam Rt 06 Rw 05 Desa Pananjung Kec. Pangandaran	20.000.000,00
17	MESJID AL-KAUTSAR	Dusun Bojongkarekes Rt 002 Rw 014 Desa Babakan Kec. Pangandaran	15.000.000,00
18	MESJID AL-ANWAR	Dusun Sukadana Rt 022 Rw 009 Desa Kalijati Kec. Sidamulih	15.000.000,00
19	MESJID AT-TAUBAT	Dusun Pamuntuan Rt 002 Rw 008 Desa Kersaratu Kec. Sidamulih	15.000.000,00
20	MESJID HUDATUSSALAM	Dusun Karangtawang Rt 002 Rw 014 Desa Sidamulih Kec. Sidamulih	20.000.000,00
21	MESJID AL-BAROKAH	Dusun Cijoho Rt 002 Rw 004 Desa Parakanmangu Kec. Parigi	25.000.000,00
22	MESJID AL AZIZIYAH	Dusun Dukuh I Rt 002 Rw 005 Desa Parakanmangu Kec. Parigi	25.000.000,00
23	MESJID AL-ISHLAH	Dusun Ciwaru Rt 02 Rw 05 Desa Cijulang Kec. Cijulang	50.000.000,00
24	MESJID AL BAROKAH	Dusun Sindangsari Rt 001 Rw 001 Desa Legokjawa Kec. Cimerak	10.000.000,00
25	MESJID NURUL WILDAN	Dusun Madasari Rt 034 Rw 011 Desa Masawah Kec. Cimerak	10.000.000,00
26	MESJID AL ISTIQOMAH	Dusun Nyalindung Rt 032 Rw 010 Desa Masawah Kec. Cimerak	20.000.000,00
27	MESJID AL ISTIQOMAH	Dusun Cirema Rt 005 Rw 002 Desa Kertamukti Kec. Cimerak	10.000.000,00
28	MESJID BAETUL HIKMAH	Dusun Mekarsari Rt 007 Rw 004 Desa Pagerbumi Kec. Cigugur	15.000.000,00
29	MESJID BAETUL HIKMAH	Dusun Leuwiliang Rt 031 Rw 003 Desa Kertajaya Kec. Cigugur	15.000.000,00
30	MESJID AL INAYAH	Dusun Cilembu Rt 011 Rw 004 Desa Cigugur Kec. Cigugur	10.000.000,00
31	MESJID AL- HIDAYAH	Dusun Cirawa Rt 003 Rw 005 Desa Cimindi Kec. Cigugur	10.000.000,00
32	GEDUNG DAKWAH LANGKAPLANCAR	Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar	50.000.000,00
33	MIS PONDOK LOMBOK AL-HIDAYAH	Desa Sidomulyo Kec. Pangandaran	150.000.000,00
	Subtotal		1.325.000.000,00
	TOTAL		12.088.445.000,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Pajak Hotel	2014 - 2016	98.289.517,00	160.288.753,00		258.578.270,00
2	Pajak Restoran	2015 - 2016	1.908.182,00	45.027.228,00		46.935.410,00
3	Pajak Reklame	2015 - 2016	53.567.317,00	4.143.734,00		57.711.051,00
4	Pajak Air Tanah	2015 - 2016	617.736,00	690.408,00		1.308.144,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2014 - 2016	2.166.896.099,00	92.997.617,00		2.259.893.716,00
Jumlah			2.321.278.851,00	303.147.740,00	-	2.624.426.591,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)
1	2	3	4	6 = 3 - 4
1	Pajak Hotel	258.578.270,00	2.374.043,13	256.204.226,87
2	Pajak Restoran	46.935.410,00	572.894,34	46.362.515,66
3	Pajak Reklame	57.711.051,00	3.711.173,65	53.999.877,35
4	Pajak Air Tanah	1.308.144,00	84.208,92	1.223.935,08
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.259.893.716,00	1.233.017.681,53	1.026.876.034,47
Jumlah		2.624.426.591,00	1.239.760.001,57	1.384.666.589,43

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Lampiran X : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SKPD	Uraian	Jumlah	Jumlah Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1					
2					
3					
4					
5					
	Jumlah				

NIHIL

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran XI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Lembaga/Bada n/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah yang Tekah Disertakan sampai dengan akhir Tahun ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampil dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1												
2												
3												
4												
5												
Jumlah												

NIHIL

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



Lampiran XII : PERATURAN DAERAH
Nomor : 2 TAHUN 2017
Tanggal : 12 September 2017

KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	93.472.588.057,00	5.395.618.089,00	2.345.327.455,00	96.522.878.691,00
2	Peralatan dan Mesin	142.243.152.317,99	39.111.605.329,85	12.317.843.854,10	169.036.913.793,74
3	Gedung dan Bangunan	339.126.352.894,04	78.965.873.308,00	27.618.377.225,00	390.473.848.977,04
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	723.003.391.116,00	208.479.981.730,56	26.411.852.920,23	905.071.519.926,33
5	Aset Tetap Lainnya	25.955.377.418,75	5.631.211.725,00	2.707.417.199,00	28.879.171.944,75
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	25.712.509.879,56	11.989.874.150,00	25.731.409.879,56	11.970.974.150,00
7	Akumulasi Penyusutan	(229.927.610.521,88)	(74.170.833.072,04)	-	(304.098.443.593,92)
Jumlah		1.119.585.761.161,46	275.403.331.260,37	97.132.228.532,89	1.297.856.863.888,94

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

No.	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Akumulasi Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Kecamatan Cimerak	82.350.000,00	945.691.729,94	266.470.000,00	-	-	-	810.797.468,07
24	Kecamatan Cigugur	-	736.363.918,00	1.462.878.000,00	-	-	-	984.954.027,00
25	Kecamatan Langkaplancar	7.875.000,00	984.799.413,46	1.598.207.020,00	-	-	-	820.233.874,76
26	Dinas Pariwisata Perindagkop	15.374.131.210,00	3.887.558.536,00	23.065.470.619,00	5.773.780.359,00	1.927.000,00	448.732.000,00	11.384.651.974,00
27	Dinas Kelautan, Pertanian & Kehutanan	6.587.117.000,00	4.895.667.226,70	24.404.607.675,00	7.759.750.730,00	25.000.000,00	-	7.949.175.178,00
JUMLAH TOTAL		96.522.878.691,00	169.036.913.793,74	390.473.848.977,04	905.071.519.926,33	28.879.171.944,75	11.970.974.150,00	304.098.443.593,92

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Bupati Pangandaran



H. JEJE WIRADINATA



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran XIV : **PERATURAN DAERAH**
Nomor : 2 TAHUN 2017
Tanggal : 12 September 2017

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.813.506.000,00	-	5.813.506.000,00	-
2	Dinas PUHUBKOMINFO	19.289.555.414,56	11.541.142.150,00	19.308.455.414,56	11.522.242.150,00
3	Dinas Pariwisata Perindagkop	609.448.465,00	448.732.000,00	609.448.465,00	448.732.000,00
JUMLAH TOTAL		25.712.509.879,56	11.989.874.150,00	25.731.409.879,56	11.970.974.150,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	71.950.000,00	-	22.450.000,00	49.500.000,00
2	Aset Tak Berwujud	323.200.091,00	3.653.093.991,00	1.473.733.291,00	2.502.560.791,00
3	Amortisasi	(80.800.022,75)	(1.230.708.160,15)	3.297.000,00	(1.308.211.182,90)
4	Aset Lain-Lain	157.304.142.489,64	15.261.048.779,00	8.759.009.691,00	163.806.181.577,64
	Jumlah	157.618.492.557,89	17.683.434.609,85	10.251.895.982,00	165.050.031.185,74

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			NIHIL					
2								
3								
4								
Jumlah								

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51.805.428,00	51.521.928,00		103.327.356,00
2	Pendapatan Diterima Di Muka	2.225.000,00	3.574.600,00		5.799.600,00
3	Utang Belanja	-	32.477.517,00		32.477.517,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	30.504.641.350,00		30.504.641.350,00
	Jumlah	54.030.428,00	30.592.215.395,00	-	30.646.245.823,00

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1		NIHIL			
2					
3					
4					
Jumlah					

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



Lampiran XIX : PERATURAN DAERAH
Nomor : 2 TAHUN 2017
Tanggal : 12 September 2017

KABUPATEN PANGANDARAN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir TA 2016	Jumlah yang Dinggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016		
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 5 + 6)	8
1			NIHIL				
2							
3							
4							
Jumlah							

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Sumber b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Perbankan 1. PT. Bank A 2. PT. Bank B 3.																	
	Sub Total (1)																	
2	Bidang Asuransi 1. PT. Asuransi A 2. PT. Asuransi B 3.																	
	Sub Total (2)																	
2	Bidang																	
	Sub Total (3)																	
	Total Seluruh Bidang Industri																	

NIHIL

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 12 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017

Lampiran XX.2 : PERATURAN DAERAH

Nomor : 2 TAHUN 2017

Tanggal : 12 September 2017



KABUPATEN PANGANDARAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Sumber b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Perbankan 1. PT. Bank A 2. PT. Bank B 3.																	
	Sub Total (1)																	
2	Bidang Asuransi 1. PT. Asuransi A 2. PT. Asuransi B 3.																	
	Sub Total (2)																	
2	Bidang																	
	Sub Total (3)																	
Total Seluruh Bidang Industri																		

NIHIL

Bupati Pangandaran

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 2 / 174 / 2017